

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Kas Desa	19
1. Pengertian Umum Tanah Kas Desa	19
2. Pemanfaatan Tanah Kas Desa	20
3. Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa	22
B. Tinjauan Umum Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Bagian Keuangan Negara	23
C. Tinjauan Umum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	25

1. Pengertian Umum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	25
2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	29
a. Tahap Perencanaan	30
b. Tahap Persiapan	31
c. Tahap Pelaksanaan.....	35
d. Tahap Penyerahan.....	40
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	41
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	41
2. Tipologi Tindak Pidana Korupsi	45
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
1. Jenis Penelitian	48
2. Sifat Penelitian	49
B. Bahan Penelitian.....	50
C. Cara Pengumpulan Data.....	53
1. Teknik Pengumpulan Data	54
2. Alat Pengumpulan Data	55
3. Lini Masa.....	55
D. Lokasi Penelitian.....	56
E. Subjek Penelitian.....	57
F. Analisis Hasil Penelitian	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hukum Positif di Indonesia mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta	60
1. Peraturan Pemerintah Pusat tentang Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	62
2. Peraturan Pemerintah Daerah terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	65
3. Potensi Korupsi Dalam Pelepasan Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	72
a. Potensi Korupsi dalam Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa	74
b. Potensi Korupsi dalam Tahap Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa	80
c. Potensi Korupsi dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa	85
d. Potensi Korupsi dalam Tahap Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa	89
B. Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Penyerahan Tanah Pengganti	93
1. Analisis Subtansi Hukum (<i>Legal Substance</i>) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa	94
2. Analisis Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa	97
3. Analisis Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa	109
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112

B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
A. Buku	115
B. Artikel Jurnal.....	117
C. Hasil Penelitian	117
D. Artikel Internet	118
E. Peraturan Perundang-Undangan.....	119
F. Putusan Pengadilan	121